



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPRRI
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT
TRANSPORTASI DAN ELEKTRIKA (ILMATE) KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN RI DAN DIREKTUR UTAMA PT KRAKATAU STEEL
(PERSERO)**

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2021-2022 |
| Masa Persidangan | : III |
| Rapat ke- | : 22 (Dua Puluh Dua) |
| Jenis Rapat | : RDP |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari, Tanggal | : Senin, 14 Februari 2022 |
| Waktu | : Pukul 10.00 WIB s.d 12.00 WIB |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi VII DPRRI Gedung Nusantara I, Lantai 1, Jakarta |
| Ketua Rapat | : Bambang Haryadi, S.E./F-P.Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI |
| Sekretaris Rapat | : Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPRRI |
| Acara | : 1. Program <i>Smelter</i> Kalimantan Selatan; 2. <i>Blast Furnace</i> yang Mangkrak; 3. Penjelasan terkait Impor Baja; dan 4. Lain-lain. |
| Hadir | : 39 orang anggota hadir dari 52 orang Anggota Komisi VII DPRRI dengan rincian sebagai berikut: |

A. Anggota DPRRI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-P.Nasdem/Ketua Komisi VII DPRRI
2. Dony Maryadi Oekon, S.T./F-PDIP/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
3. Bambang Haryadi, S.E./F-P.Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

- 9 orang anggota dari 11 anggota
1. H. Yulian Gunhar, S.H., M.H.
 2. H. Naszirul Falah Amru, S.E.
 3. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
 4. Mercy Chriesty Barends, S.T.

5. Adian Yunus Yusak Napitupulu
6. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
7. Paramitha Widya Kusuma, S.E.
8. Novri Ompusunggu
9. Herman Hery

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

6 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H. M. Ridwan Hisyam
2. Drs. H. M. Gadung Pardiman, M.M.
3. Drs. Mukhtarudin
4. Ir. Lamhot Sinaga
5. Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc.
6. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

4 orang anggota dari 6 anggota:

1. R. Wulansari
2. Ramson Siagian
3. Katherine A. Oendoen
4. H. Nurzahedi, S.E.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

4 orang anggota dari 4 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Arkanata Akram, ST, B.E.(Hons), M.Eng.Sc.
3. Rian Firmansyah, S.Pd.
4. Rico Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

3 orang anggota dari 6 anggota:

1. H. Abdul Kadir Karding, S.Pl., M.Si.
2. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E., M.M.
3. H. Marwan Ja'far

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang anggota dari 4 anggota:

1. Sartono Hutomo, S.E., M.M.
2. Muhammad Nasir
3. Zulfikar Hamonangan, S.H.
4. Rusda Mahmud

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring
2. Dr. H. Mulyanto, M.Eng
3. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 orang anggota dari 3 anggota:

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.
2. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.
3. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang Anggota dari 1 Anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Taufiek Bawazier (Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan ElektriKA/ILMATE)
2. Silmy Karim (Direktur Utama PT Krakatau Steel)

Jalannya Rapat :

**KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-P.GERINDRAWAKIL
KETUA KOMISI VII DPRRI):**

Baik.

Assalamualikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII yang hadir secara *virtual*, dan

Oh, selamat datang Pak Ketua.

Dan yang kami hormati seluruh Anggota Komisi VII yang hadir secara fisik maupun secara *virtual*,

Yang saya hormati Bapak Dirjen Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi, serta Elektronika atau ILMATE beserta jajaran,

Yang kami hormati Bapak Dirut Krakatau Steel beserta jajaran, serta Seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu guna melaksanakan tugas konstitusional kita. Dan pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih pada seluruh hadirin, anggota Komisi VII, serta Dirjen ILMATE, dan juga Dirut Krakatau Steel Persero, Tbk yang telah hadir dalam acara Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI, baik secara fisik maupun *virtual*.

Sesuai undangan yang telah disampaikan, dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPRRI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, pada hari ini kami Komisi VII DPRRI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen ILMATE, Kemenperin, dan Dirut PT Krakatau Steel Tbk, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dengan agenda:

1. *Progress* smelter di Kalimantan Selatan;
2. *Blast furnace* yang mangkrak;

3. Penjelasan terkait impor baja; dan
4. Lain lain.

Berdasarkan data dari sekretariat, anggota Komisi VII yang telah hadir berjumlah 14 anggota dari 52 anggota Komisi VII, yang terdiri dari 7 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPRRI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi. Dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup.

Oleh karena itu, saya dari meja pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat dengar pendapat hari ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka. Apakah dapat disetujui?

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Setuju Pimpinan, setuju.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Setuju, setuju.

KETUA RAPAT :

Atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI dibuka, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Sebelum saya melanjutkan rapat ini, saya, izinkan saya memperkenalkan beberapa anggota baru dari beberapa, dari dua fraksi. Pertama saya sebutkan:

1. H. Marwan Ja'far, A-019 dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, yang semula ada, beliau ada di Komisi VI, sekarang bergeser ke Komisi VII;
2. Bapak Ramson Siagian, A-104 dari Fraksi Partai Gerindra yang semula di Komisi IX, sekarang kembali lagi ke Komisi VII;
3. H. Iwan Kurniawan, S.H., M.Si., A-124 dari Fraksi Partai Gerindra yang semula ada di Komisi VIII, sekarang ditempatkan oleh fraksi, kebetulan se-fraksi saya di Komisi VII.

Itu ada 3 anggota baru di Komisi VII.

Sebelum melanjutkan rapat ini, kami meminta persetujuan Bapak/Ibu anggota Komisi VII, bahwa rapat ini akan kita selesaikan maksimal pukul 12.00 WIB. Dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Bapak/Ibu yang kami hormati,

PT Krakatau Steel Tbk, merupakan produsen baja terbesar di Indonesia. Dan ini salah satu BUMN andalan negara kita. Dan pemain baja penting di kawasan Asia Tenggara. Dalam upaya pemenuhan bahan baku *sponge iron*, yang merupakan bahan baku utama dari industri baja, PT Krakatau Steel bersama Aneka Tambang telah membuat perusahaan patungan yang bernama PT Meratus Jaya Iron & Steel yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. PT Meratus Jaya Iron & Steel yang sempat memproduksi selama kurang lebih 3 tahun, 2012 sampai 2015, dan telah melakukan pengiriman perdana produk *sponge iron* sebanyak 5.000 metrik ton ke Krakatau Steel. Namun, sejak tahun 2015 hingga sekarang, perusahaan tersebut tidak beroperasi lagi karena kendala bahan baku, infrastruktur dan pemasaran.

Selain PT Meratus Jaya Iron & Steel yang telah berhenti beroperasi, proyek *blast furnace* yang PT Krakatau Steel yang telah dirilis sejak tahun 2008, dan dilakukan kegiatan konstruksi pada tahun 2012, dan hingga saat ini belum beroperasi juga, merupakan masalah tersendiri yang harus ditangani dengan baik oleh PT Krakatau Steel. Mangkraknya proyek tersebut mengakibatkan beban kerugian yang harus ditanggung PT Krakatau Steel yang mencapai USD 850 juta atau sekitar 12,75 triliun rupiah. Padahal proyek *blast furnace* ini memiliki peran yang penting dalam upaya menekan bahan impor, *iron ore*, eh bahan baku, *iron ore*, dan menghemat biaya produksi dikarenakan penggunaan bahan baku lokal.

Walaupun kita memiliki industri baja seperti Krakatau Steel, namun kondisi baja nasional saat ini dihadapkan pada permasalahan tingginya impor baja. Berdasarkan data BPS, *volume* baja impor kode HS 72 sampai kuartal III 2021 tercatat sebesar 4,3 juta ton atau naik 20% dibanding periode yang sama tahun 2020 sebesar 3,6 juta ton. Dari peningkatan tersebut, porsi impor terbesar merupakan baja *Cold Rolled Coil* atau *Sheet* (CRCS) yang mencapai 1,33 juta ton atau mengalami kenaikan 63% dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 812.000 ton. Terjadinya peningkatan impor baja yang tidak terkendali tersebut akan berdampak pada tingkat utilisasi industri baja nasional.

Selanjutnya, untuk efektivitas rapat dengar pendapat hari ini, saya ingin memberikan waktu kepada Dirjen ILMATE untuk menyampaikan paparan, penjelasan dan juga kendala-kendala yang dihadapi terkait maraknya impor bahan baku, khususnya untuk baja. Memang pada saat ini, kami, Komisi VII ada panja, Panja Pengawasan Bahan Baku Industri. Namun, memang untuk produk baja ini kita agendakan setelah, kita produk pangan terlebih dulu Pak Dirjen. Namun,, kita juga ingin menggarisbawahi, waktu itu kami panggil ISE ya? Namun, kita sayangkan, Ketua ISE, Pak Direktur kurang bisa merespon dengan baik. Saya, Ketua panja-nya Pak Direktur kan. Kami cukup kecewa ketidakhadiran Pak Direktur, tapi *Insyah* Allah kita akan panggil. Tenang saja, ada gilirannya Pak, gitu.

Nah, untuk menyingkat waktu dan keterbatasan kita juga di dalam masa pandemi ini, karena sesuai protokol kesehatan kita ada waktu-waktu untuk pembatasan rapat. Kami berikan untuk pertama kalinya kepada Pak Dirjen untuk memberikan paparan, dan selanjutnya kami juga persilakan kepada Dirut Krakatau Steel.

Silakan Pak Dirjen, waktu dan tempat kami persilakan.

DIRJEN ILMATE (TAUFIK BAWAZIER):

Bismillah.

Terima kasih.

Pak Ketua Komisi VII,
Wakil Ketua Komisi VII,
Anggota Komisi VII yang saya hormati secara fisik maupun *virtual*,
Direktur Utama Krakatau Steel dan jajarannya, dan
Semua hadirin peserta rapat.

Jadi, Pak Pimpinan, jadi kalau bicara baja seharusnya saya usul kalau misalnya ke depan ada panja seperti ini dihadirkan juga dari Kementerian BUMN, khususnya deputi. Karena kami sejak tahun 1998, BUMN Krakatau Steel, dan mungkin BUMN lain itu tidak di bawah langsung binaan kita. Jadi mungkin bisa langsung, karena ini menyangkut *plan* investasi dan lain sebagainya. Nanti bisa dihadirkan ke depan itu seperti apa. Tapi kalau sebelum 1998, itu memang Kementerian Perindustrian ada di situ, dan Krakatau Steel itu adalah bagian sebenarnya dari Kementerian Perindustrian. Jadi ini yang tidak terpisahkan. Jadi kami setuju untuk ke depan bisa memperkuat sektor.

Kami berbicara tentang sektor kebijakan industri baja. Jadi, kalau baja ini ada dua sebetulnya salurannya. Yang pertama adalah baja *carbon steel*, jadi *stainless steel*, yang kedua adalah baja karbon. Dan baja karbon itu sendiri dibagi dua yang baja *nonaloe* dan *engineering steel*. Ya ini yang mungkin ke depan nanti bisa kita lihat.

Kami secara Kementerian Perindustrian sudah melakukan bagaimana *policy* kebijakan baja ini bisa terus dilakukan supaya *balance*. Artinya antara *stainless steel* dan *carbon* itu juga berjalan dengan baik. Dan kemarin 2021, statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor industri logam dan baja itu tumbuh 11,5%. Artinya ini yang mungkin kita perlu dorong. Jadi, memang dalam satu sisi kita impornya masih ada, tapi ekspornya juga tinggi. Jadi, secara *balance of payment*-nya pemerintah kita masih surplus.

Kalau lihat *picture* daripada industri kita, jadi secara nasional, memang di tahun 2020 pandemi, pandemi, dan mungkin secara keseluruhan industri baja nasional turun secara apa namanya, utilisasinya, dan juga produksi, dan mulai bergeliat kembali tahun 2021. Dan sebelum proses tata laksana daripada impor baja ini, sebenarnya ada beberapa kementerian yang terkait, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan. Nah, nanti di ujung itu

adalah Kementerian Keuangan di Bea Cukai. Dan di sana juga kami memprioritaskan untuk melakukan verifikasi. Di situ ada Sucofindo KSO. Jadi, artinya setiap barang masuk ke Indonesia, itu dari pelabuhan muat itu harus dilakukan verifikasi. Ini yang perlu dilakukan juga nanti melihat sampai seberapa besar verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman dari KSO terkait dengan baja yang masuk di Indonesia, itu juga dilakukan pendalaman.

Terus yang kedua masalah apa namanya, pertumbuhan daripada industri baja ini sendiri. Kami melihat proses tata laksana impor, itu pertama kita masukkan dari industri itu masuk ke sistem elektronik SIINas. Dari SIINas, melalui Permendag 20 yang terakhir, itu kita masuk ke INSW. Nanti INSW mendistribusikan ke Kementerian Perdagangan, baru keluarlah namanya PI impor, persetujuan impor daripada komoditas baja.

Kami dari Kementerian Perindustrian melakukan verifikasi dalam konteks pertimbangan teknis. Itu waktu itu kami menugaskan Sucofindo untuk mensensus, mensensus seluruh industri baja yang ada di Indonesia, kemampuan verifikasi industrinya. Jadi, masing-masing industri baja. Di baja ini ada.

Pimpinan,

Jadi di baja ini ada dua sebetulnya. Jadi industri baja yang memproses baja, ada industri pengguna baja. Jadi, industri otomotif, industri perminyakan, industri elektronik, ini kita kategorikan sebagai *engineering steel*. Dan posisi saat ini Indonesia tidak punya produksinya. Nanti bisa di-*crosscheck*. Karena kita harus melakukan pendalaman ke depan. Itu *engineering steel* itu juga penting sekali untuk dilakukan.

Kalau lihat dari data, secara keseluruhan tahun 2021 Pimpinan, itu ada di layar, kita bisa tunjukkan bahwa utilitasnya secara *average*, dari semua yang di hulu, di tengah, jadi yang disampaikan Pak Pimpinan tadi, HRC, CRC, BjLAS dan terakhir di ujungnya, nanti *coating* BjLAS, rata-rata nasionalnya 61, eh 67 koma sekian. Itu bisa dilihat di layar. Itu yang menjadi utilitasnya sebagai ukuran.

Jadi, kalau kita memberikan rekomendasi itu bukan kapasitas, tapi potret *best evidence* produksi tahun sebelumnya. Ini yang jadi ukuran kita memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini dipakai atau tidak, terserah daripada Kementerian Perdagangan. Jadi, Kementerian Perdagangan kalau ikut rekomendasi kita, *Insyah Allah* semuanya terukur.

Kami tidak melakukan, kami tidak punya akses untuk melihat berapa potret PI yang dikeluarkan di Kementerian Perdagangan. Terus yang kedua, kami tidak punya akses baja-baja yang masuk di pelabuhan. Itu datanya, dan itu di luar otoritas kita. Jadi kalau, saya sepakat, kami berposisi bahwa Kementerian Perindustrian memperkuat Krakatau Steel sebagai industri baja, karena kami dan Krakatau Steel itu punya hubungan empiris dari awal berdirinya. Jadi kami, *policy* kita akan mendukung industri baja supaya lebih kuat di Indonesia untuk tumbuh dan berkembang. Itu posisi kami Pak Pimpinan.

Hal-hal lain mungkin kami akan bisa sisipkan, karena data ini sangat banyak sekali. Di baja ini sangat luar biasa, dari mulai aspek teknisnya dan sebagainya. Nanti kalau Pimpinan membutuhkan, kami siapkan berapa kebutuhan dan berapa yang kami berikan rekomendasi impornya. Kami terbuka dan transparan.

Demikian Pimpinan yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Pak Dirjen, izin sedikit.

Kalau besi siku seperti yang diselundupkan PT Gunung, apa itu kemarin itu, yg di Polda Metro Jaya, yang senilai 2,6 triliun, yang punya anggota IISIA, Kimin Tanoto apa namanya itu, itu masuk industri apa Pak?

DIRJEN ILMATE (TAUFIK BAWAZIER):

Itu industri baja juga. Artinya, tapi kalau masalah yg selundupan bukan otoritas kami Pak Pimpinan. Jadi, kami tidak punya peran di situ. Jadi, biarlah aparat penegak hukum yang menyelidiki.

KETUA RAPAT :

Baik, baik.

Selanjutnya Pak Direktur, silakan.

DIREKTUR UTAMA PT KRAKATAU STEEL (SILMY KARIM):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Bapak Bambang Haryadi selaku Pimpinan Rapat, dan Pimpinan juga Komisi VII, Pak Sugeng Suparwoto, beserta Seluruh Anggota Dewan yang terhormat Komisi VII, baik yang melalui fisik maupun *virtual*,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pak Dirjen beserta seluruh jajaran, dan juga Direksi PT KS beserta seluruh jajaran,

Dari apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan rapat, bahwasanya ada 3 hal yang menjadi poin diskusi pada pagi hari ini, dengar pendapat dengan Komisi VII. Saya akan mulai dari *blast furnace* dulu, Bapak Pimpinan.

Yang pertama adalah, proyek *blast furnace* ini, memang ini proses panjang ya, di mana awal pembahasan diskusi internalnya itu sudah dari 2008. Kemudian, di situ juga mulai dieksekusi proyeknya di 2012, kemudian dilanjutkan dengan proses konstruksi, sampai penyelesaian proyek di tahun 2019. Jadi, ketika kami bergabung, salah satu penugasan yang diemban adalah selesaikan proyek *blast furnace* kepada kami. Saya *join* 2018 akhir. Jadi, ketika itu, progres itu di kisaran 98% atau 99% progres proyek. Kami kejar dalam hitungan bulan agar segera beroperasi dan akhirnya berproduksi di tahun 2019. Kemudian setelah beroperasi, kami menghitung antara produk yang dihasilkan dengan harga jual tidak cocok hitungannya atau dengan kata lain rugi. Dengan izin Kementerian BUMN, kemudian konsultasi dengan BPK, dengan kajian lembaga independen, kita putuskan untuk dihentikan operasinya.

Salah satu penyebab ketidakefisienan daripada *blast furnace* Krakatau Steel adalah, tidak adanya fasilitas *basic oxygen furnace*. Karena semula BOF yang dirancang tetap menggunakan jalur *electric arc furnace* yang sudah dimiliki Krakatau Steel. Sehingga di situ dalam satu proses terjadi kehilangan atau penambahan biaya yang mengakibatkan adanya selisih biaya jika melewati jalur *basic oxygen furnace* dengan jalur memodifikasi yang lama. Manajemen saat itu ya, yaitu kami-kami ini ya, memutuskan untuk tidak mengoperasikan ya. Atas seluruh kajian yang ada, termasuk juga kejaksaan juga, kita hentikan sambil kita siapkan fasilitas BOF-nya.

Sehubungan saat itu juga misi yang diemban oleh kami adalah melakukan restrukturisasi dan transformasi. Jadi, ini seiring, bahwasannya proyek ini memang harus diselesaikan kemudian dihentikan karena sangat menguras kemampuan keuangan KS. Belum lagi dengan utang yang ditimbulkan akibat dengan proyek ini yang harus dilakukan restrukturisasi. Setelah proses itu kita selesaikan, kemudian kita lanjutkan dengan restrukturisasi yang lain ya, *alhamdulillah* KS bisa membukukan keuntungan 2 tahun berturut-turut.

Nah, langkah penyelesaian *blast furnace* itu kita mulai dengan mencari partner. Fasilitasnya sudah ada, sudah berjalan atau sudah sempat jalan. Kemudian kita harus melakukan investasi tambahan untuk *basic oxygen furnace* sebesar 100 juta dolar. Nah, berhubung kita lagi restrukturisasi dan kita harus mengoptimalkan sisa daripada kemampuan keuangan yang ada untuk melakukan transformasi, maka kita utamakan adalah langkah-langkah yang bisa memberikan dampak cepat untuk *men-turn around* Krakatau Steel.

Ada beberapa pihak asing yang berminat untuk bekerja sama di *iron steel making*, Krakatau Steel. Ini adalah juga untuk mengurangi resiko kita pada proyek tersebut, karena sudah terlalu banyak uang yang digunakan yang masuk ke dalam proyek itu. Arahan daripada Menteri BUMN juga untuk melihat apa penyebabnya dari sudut pandang hukum sehingga Kementerian BUMN juga melibatkan gedung bundar.

KETUA RAPAT :

Pak, dijelaskan tahunnya Pak. Menteri BUMN siapa? Bu Rini atau Pak Erick?

DIREKTUR UTAMA PT KRAKATAU STEEL (SILMY KARIM):

Pak Erick, Pak Erick pada tahun 2021 ya, setelah peresmian daripada fasilitas HSM 2 yang cukup baik ya, yang sangat baik bahkan, maka muncullah arahan untuk menyelesaikan dari sisi hukum. Ditindaklanjuti ya, dan tentunya kami selaku pimpinan di Krakatau Steel mempersiapkan dengan sebaik-baiknya informasi atau hal-hal yang dibutuhkan oleh Kejaksaan Agung dalam hal proses penegakan hukum, melihat potensi daripada hal-hal yang kiranya bisa dianggap sebagai penyimpangan dari sisi hukum. Saat ini sedang berlangsung ya dan kabar yang kami terima dalam waktu dekat akan ada apa, kesimpulan dan langkah lanjut daripada yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Jadi ada 2 hal dalam proyek *blast furnace*. Yang pertama adalah menyelesaikan dari sisi komersial, yaitu mencari *partner*, yang kedua adalah dalam konteks penegakan hukum.

Yang berikutnya adalah kaitan dengan MJIS yang ada *smelter* di Kalimantan Selatan. Meratus Jaya Iron, jadi ini patungan antara Krakatau Steel dengan Antam. 2/3 Krakatau Steel atau 66%, kemudian Antam 34% atau 1/3 nya. Proyek ini memang dilakukan tidak optimal ya. Kenapa kami sebutkan tidak optimal? Karena pertama adalah lokasinya jauh dari akses atau hambatan logistik, karena tidak di pinggir laut ya. Kurang lebih ada 20-30 kilometer dari bibir pantai, sehingga mengakses jalan provinsi ya, untuk mobilitas yang besar itu sangat-sangat *costly*. Kemudian tanahnya sendiri bukan milik Meratus, tetapi milik pemda, sehingga ada isu kaitan dengan tanah. Kemudian dari sisi aspek teknologi, tidak mengikuti tren perkembangan daripada hal kaitan dengan efisiensi. Proyek ini benar-benar tidak beroperasi akibat daripada tidak digunakannya lagi *sponge iron* sebagai bahan baku produksi Krakatau Steel. Sehingga sejak tahun 2015, dihentikan operasinya. Dan saat ini dalam proses likuidasi.

Di masa proses sampai likuidasi, kita terus berupaya untuk mencari solusi lain ya, tetapi ketika masuk kepada aspek investasi, tentunya ini merupakan prioritas yang tidak utama, karena prioritas utama kita adalah yang memang sudah kuat di pasar, yaitu produk HRC dan CRC, atau produk-produk *long product* seperti WF, siku, maupun produk-produk *long product*.

Aspek hukum sempat menjadi wacana, tetapi tidak ada arahan yang lebih lanjut kaitan dengan MJIS. Kemudian kalau dengan aspek komersial, sudah beberapa yang hadir, datang, melihat, tetapi mengurungkan minatnya akibat daripada lokasinya yang tidak strategis.

Jika disampaikan dekat dengan bahan baku, tetapi dekat bukan berarti biayanya juga murah. Karena harus terjadi proses pemindahan bahan baku yang tidak efisien. Kemudian juga spesifikasi bahan baku yang terbatas sehingga memang nilai tambah jika kita upayakan ini kembali hidup, khususnya dari internal, tidak lagi *visible*. Kecuali ini merupakan bagian daripada *supply*

chain pihak ketiga yang lain atau negara lain itu memungkinkan, tetapi untuk KS sendiri, ini tidak relevan lagi untuk kita kembangkan.

Yang berikutnya adalah poin ketiga yang tadi disampaikan oleh Pimpinan Rapat kaitan dengan impor baja. Kami mendapatkan *support* dari Dirjen ILMATE dalam hal bagaimana menata arus impor agar Krakatau Steel ataupun juga industri baja nasional bisa mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi di negerinya sendiri.

Trend daripada penjualan Krakatau Steel meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2021, kami mencatatkan nilai penjualan konsolidasi sampai dengan kurang lebih 31 triliun rupiah. Bahwasanya masih ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, itu sedang kami kaji dan juga lakukan secara bersama-sama. Hubungan Krakatau Steel dengan Kementerian Perindustrian cukup baik dan saya rasa ini menjadi modal kuat ke depannya agar bisa menghasilkan industri yang berdaya saing, menguntungkan, dan bisa juga menjadi kebanggaan daripada Negara Republik Indonesia.

Beberapa hal yang kita sedang perjuangkan saat ini adalah, bea masuk anti *dumping* yang kita sedang menunggu PMK-nya. Saat ini sudah di Kementerian Keuangan, kemudian juga kaitan dengan *sunset review* atau perpanjangan untuk produk HRC. Maaf, ulangi, CRC dari Jepang, Korea, RRT, Taiwan, Vietnam, kemudian HRC Korea dan Malaysia. Yang satu adalah baru, yaitu *hot rolled coil alloy* asal RRT HS 72, kemudian yang dua lagi adalah perpanjangan. Dengan *support* ini saja, ini akan memberikan banyak manfaat kepada industri baja, khususnya Krakatau Steel agar bisa bersaing di negerinya sendiri.

Mungkin itu sebagai awalan, mohon izin kalau diberikan kesempatan ada tambahan direksi atau kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, Pak Dirut.

Kan tadi sedikit saya agak ini juga, agak bingung juga. Tadi Pak Dirut bilang *blast furnace* dihentikan karena rugi, betul nggak? kan? Alasan ini, itu kan? Terus meminta pendapat dari Jamdatun atau, nggak tahu, kasusnya ini di Jamintel atau di Jampidsus? Saya bekas Komisi III. Jadi, saya paham Pak.

DIREKTUR UTAMA PT KRAKATAU STEEL (SILMY KARIM):

Di Jampidsus.

KETUA RAPAT :

Oke, ntar kita tanya Pak Febri di sana.

Jadi, pertama adalah, tadi bilang dihentikan, kan? Tapi ada yang unik ini. Ini sudah kayak dagelan saja ini pagi-pagi. Pak Dirut bilang untung, sudah jelas-jelas bahwa *blast furnace* ini salah satu, sudah beroperasi, diakui di sini sejak 11 Juli 2019 kan, sebentar dulu Pak Dirut, kan? Jadi, diakui sudah beroperasi, dan ada semangat, seperti semangat Presiden kita bahwa ingin memperkuat produksi baja dalam negeri. Yang saya unik ini gimana? Pabrik untuk *blast furnace* ini dihentikan, tapi satu sisi ingin memperkuat produksi dalam negeri, kan? Ini jangan maling teriak maling gitu loh. Jangan kita ikut bermain, pura-pura nggak ikut bermain, kan?

DIREKTUR UTAMA PT KRAKATAU STEEL (SILMY KARIM):

Maksudnya maling gimana, Pak?

KETUA RAPAT :

Loh kita dalam artian, anda menyatakan bahwa ini ingin memperkuat, tapi di satu sisi anda ingin hentikan, kan? Jadi kita ini, mana semangat untuk memperkuatnya kan? Kalau dengan cara-cara begini, kasus baja yang ada di Polda Metro sampai sekarang kita akan minta kejelasannya. Itu salah satu anggota Anda, namanya Kimin Tanoto.

DIREKTUR UTAMA PT KRAKATAU STEEL (SILMY KARIM):

Di sini saya sebagai Dirut Krakatau Steel, bukan sebagai Ketua IISIA ya.

KETUA RAPAT :

Betul.

Anda tolong ini dulu, hormati persidangan ini. Ada teknis persidangan. Kok kayaknya Anda nggak pernah menghargai komisi? Kalau sekiranya Anda nggak bisa ngomong di sini, Anda keluar.

DIREKTUR UTAMA PT KRAKATAU STEEL (SILMY KARIM):

Baik, kalau memang harus keluar, kita keluar.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Keluar.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Pimpinan, untuk menjaga marwah kita punya sidang ini, kalau beliau sudah nantangin itu ya keluar saja.

KETUA RAPAT :

Anda keluar.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Jangan sampai Pimpinan kita yang malu.

KETUA RAPAT :

Anda sudah *contempt of parliament*.

DIREKTUR UTAMA PT KRAKATAU STEEL (SILMY KARIM):

Begini, saya minta maaf.

KETUA RAPAT :

Anda merasa hebat.

DIREKTUR UTAMA PT KRAKATAU STEEL (SILMY KARIM):

Tidak, tidak.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Sudah Pimpinan, saya pikir dihentikan saja, ini sudah nantangin ruangan ini. Ruangan ini yang ditantang sama dia.

DIREKTUR UTAMA PT KRAKATAU STEEL (SILMY KARIM):

Tidak ada maksud kami menantang.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Tadi bapak sudah bilang.

KETUA RAPAT:

Tadi Bapak bilang sendiri ada teknis persidangan.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Tata beracara itu harus didengerin dulu, baru menjawab.

KETUA RAPAT :

Dan Anda sudah menjawab bahwa Anda pengen keluar. Silakan keluar.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Iya, setuju, setuju, dikeluarkan saja.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Ini *ndak* menghormati sama sekali.

DIREKTUR UTAMA PT KRAKATAU STEEL (SILMY KARIM):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Pimpinan,

Saya mengusulkan kalau boleh ditunda untuk kapan lagi, dan silakan Pimpinan mengambil kesimpulan apa untuk seperti yang seperti-seperti ini.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Baik.

Silakan Krakatau Steel untuk keluar dari rapat ini, biar kita rapat dengan Dirjen ILMATE.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, S.H.):

Pimpinan,

Izin bicara.

KETUA RAPAT :

Iya, silakan.

F-P.GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Pimpinan sebentar, saya kira nggak perlu ditunda.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, S.H.):

Ini siapa yang diizinkan bicara Pimpinan?

KETUA RAPAT :

Silakan Pak siapa ini?

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, S.H.):

Saya Adian Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Silakan.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, S.H.):

Yang mana dipersilakan? Siapa yang dipersilakan?

F-P.GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Pak Adian silakan Pak Adian, saya mengalah untuk Pak Adian.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, S.H.):

Iya dong, harus begitu Pimpinan, harus mengakomodir anggota toh?

Pimpinan,

Saya berpikir kita punya mekanisme persidangan, tetapi kita juga punya etika untuk tidak serta merta mengeluarkan siapa yang kita undang. Kenapa demikian? Karena menurut saya rapat ini pasti punya kepentingan yang cukup besar.

Saya tertarik untuk mendengar rapat ini sejak awal, karena bagi saya impor baja itu bukan persoalan uang saja, tapi di dalamnya itu ada persoalan kedaulatan, di dalamnya juga ada persoalan lain tentang membuka lapangan kerja yang lebih besar buat rakyat kita sendiri. Nah kalau menurut saya, melihat kepentingan rapat ini yang sangat besar terkait dengan kedaulatan republik, kesempatan kerja dan hal hal yang lain, saya berharap persoalan seperti ini bisa diselesaikan dengan rehat sejenak.

Bagaimana kalau rapat di-*pending* sebentar, berbicara dulu terbatas di ruang Pimpinan, baru kita lanjutkan. Kenapa? Sebentar lagi kita reses, Pimpinan. Jadi, bisa saja persoalan baja impor ini akan kita bahas masa sidang berikutnya, dan itu tertunda lagi sekitar satu bulan sampai satu bulan setengah.

Terima kasih Pimpinan yang terhormat.

KETUA RAPAT :

Baik.

Terima kasih Pak Adian.

Kita ada 2 kali memanggil Pak Dirut ini. Sebelumnya kita sudah panggil di Panja Pengawasan Industri Bahan Baku Impor kan, beliau juga mangkir kan?

Tidak ada kejelasan kan? Walaupun itu kapasitasnya sebagai Ketua IISIA. Cuma kan dasar dari itulah kita ingin bawa ke sini.

Maraknya impor baja belakangan ini kan, ini salah satu yang akan kita urai dan semakin hari, industri baja dalam negeri semakin kecil. Kami juga mendengar masukan dari Pak Dirjen, begitu semangatnya Pak Dirjen ingin menguatkan industri dalam negeri. Namun pemain-pemain baja ini, semua hanya ingin menjadi *trader*. Bahkan Krakatau Steel sendiri juga salah satu *trader*, di situ.

Nah, untuk itu Pak Dirjen, mungkin karena ini teman-teman, Pak Lamhot ingin ini, atau kita tutup, kita diskusi sebentar dengan Pak Dirjen di apa, di ruang Pimpinan.

F-P.GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Saya kira sudah cukup jelas ya. Kalau saya lihat respon dari Krakatau Steel, karena undangan kita kali ini kan adalah spesifik untuk *blast furnace*, dan pengolahan biji besi di Kalimantan Selatan. Setelah kita lihat, responnya kan sangat reaktif.

Kalau saya melihat, ini ada sesuatu ya, ini ada kartel besar yang mungkin kolaborasinya dengan mereka, sehingga respon mereka sangat reaktif seperti itu terhadap kita. Bahkan reaktifnya mereka itu sampai mengabaikan etika persidangan dan kehormatan DPR ini gitu ya. Andaikan mereka-mereka ini ya, katakanlah manajemen Krakatau Steel ini berada di balik koridor yang bagus, saya kira tidak akan begitu reaktifnya mereka ya. Nah karena mereka sangat reaktif hari ini, saya kira ada apa ini? Ini harus kita pertanyakan. Kita harus usut tuntas ini, sudah pasti mereka ini bermain.

Saya sepakat tadi apa yang dibilang Pak Adian. Ini adalah yang kita kejar adalah kedaulatan. Tapi faktanya hari ini, puluhan tahun Krakatau Steel ini adalah impor bahan baku, yang seharusnya cadangan bijih besi kita sangat tinggi. Bahkan kita punya industri pengolahan di Krakatau Steel yang sekarang mangkrak. Kan itu harusnya yang kita pertanyakan kepada mereka, dan mereka sikapnya adalah reaktif.

Nah, oleh karena itu, menurut saya Pimpinan ya, saya juga tadinya ingin mengejar hal kedaulatan ini karena saya tidak suka dengan hal-hal yang sifatnya impor ya. Kemarin kita baru membicarakan hilirisasi nikel, tapi hulunisasi Krakatau Steel ini kan dulu, dari dulu saya teriakin ini ya. Krakatau Steel ini besar, tapi isinya kayak kerupuk, kepompong di dalamnya. Pimpinan tadi sudah mengatakan bahwa mereka itu untung bukan karena produksinya, tapi karena *trading*. Nah, ini kan sesuatu yang pantas dipertanyakan dengan manajemen mereka yang, kalau kita lihat lagi *statement* belakangan ini, kadang-kadang Erick Thohir bilang Krakatau Steel bangkrut, Krakatau Steel untung, mana yang benar ini? Jadi, ini kan ibarat sebuah sirkulasi kartel yang sangat dalam sekali gitu.

Nah, untuk itu Pimpinan, saya kira nggak perlu ditunda Pak Rico ini sudah jelas ini sikap yang paling buruk di dunia ini ya. Kita harus menentukan sikap terhadap perilaku Krakatau Steel hari ini. Kalau saran saya, ya sudah kita ambil tindakan tegas terhadap mereka, sehingga dengan itu ya, kita usut tuntas ini.

Dulu pun saya sudah mengusulkan, kita bentuk Panja Baja sebenarnya, tapi dengan ini saya lihat, nggak perlu lagi kita, sudah bisa mengambil tindakan yang tegas.

Terima kasih Pimpinan.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, S.H.):

Pimpinan, izin Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Baik, silakan.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, S.H.):

Saya fikir, justru itu yang harus kita dengar dari rapat ini, bukan? Karena impor kan tidak cuma persoalan baja. Bahkan misalnya, kenapa, saya mau tanya sama Dirjen ILMATE misalnya. Kenapa sampai *limestone* pun kita harus impor? Ini kan ada korelasinya. Dan, apakah impor itu boleh, bisa memungkinkan atau tidak? Itu tidak dilakukan oleh pelaku, tapi oleh regulator.

Kalau kemudian misalnya saya menjadi *trader*, peluang saya, kesempatan saya menjadi *trader* ini kan bukan karena saya, tapi karena secara regulasi, dia dimungkinkan. Nah makanya menurut saya, kenapa hilang gambarnya Pimpinan? Makanya menurut saya penting sekali kita lanjutkan rapat ini dengan para pihak, kalau perlu kita tambah. Seperti yang diusulkan oleh Pak Dirjen tadi, Kementerian Perdagangannya mana? Deputi BUMN-nya mana? Menurut saya rapat ini nggak kompliit ya. Kenapa kita cuma mendengar 2 pihak, sementara masih ada 2-3 pihak lain yang sebenarnya terkait dengan hak impor baja ini.

Kalaupun misalnya, rapat ini mau segera kita tutup, harus mengagendakan untuk memanggil pihak-pihak yang lain. Misalnya Kementerian Keuangan. Saya kan mau tahu, kenapa baja impor bisa masuk sedemikian banyaknya? Apa hubungan dengan pajak? Diuntungkan tidak kita? Apa yang didapatkan negara dari pajak impor ini? Itu kan perlu kita diskusikan karena semua saling terkait Pimpinan.

Tidak bisa kemudian kalau menurut saya, kita sepihak menyalahkan mereka yang menjadi *trader*. Apakah bisa jadi *trader* atau tidak bisa jadi *trader*, itu persoalannya tidak di mereka, tapi regulasi memungkinkan tidak itu? Nah regulator-regulator ini harus kita kumpulkan. Kalau memang tidak boleh jadi *trader*, ya larang saja. Tapi kalau kemudian regulasi memungkinkan dan ada

pihak yang kemudian mengambil posisi sebagai *trader*, lalu kita persalahkan, yang salah pelaku atau pembuat peraturan? Kan menurut saya.

KETUA RAPAT :

Pak Adian?

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, S.H.):

Iya, Pimpinan?

F-P.GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Sedikit Pimpinan, iya, sedikit.

Kalau saya lihat, mereka sendirilah yang menciptakan sebuah kesempatan untuk menjadikan mereka sebagai *trader* ya. Kenapa? Karena kita punya namanya industri pengolahan biji besi yang lagi mangkrak di Krakatau Steel. Artinya dari sisi regulator ini sudah nggak masalah. Mereka sudah diberikan kesempatan kok. Yang saya sampai hari ini kan selalu teriak-teriak kenapa sih Indonesia ini mempunyai kandungan biji besi yang besar, tapi kita impor, ada apa? Yang kita lihat di luar sana rumornya ada kartel besar untuk impor bahan biji besi. Kita punya cadangannya, kenapa kita masih impor?

Nah, ini menurut saya bukan hanya semata-mata bahwa Krakatau Steel dia sudah diberikan kesempatan. Bahkan dia bekerja sama dengan KS Posco. Satu sikap lagi yang paling akhir. Tadi kita dengar sendiri, dia lagi menunggu PMK untuk meminta perlindungan impor *high risk*-nya dengan biaya masuk anti *dumping*. Ini perusahaan apa ini? Korporasi yang besar, masa anti *dumping*-nya mau dilegalkan? Apa ini? Kan aneh ini.

Saya kira begitu Pimpinan.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, S.H.):

Saya belum selesai bicara loh?

KETUA RAPAT :

Masih ada sekali lagi? Ayo silakan Pak Adian, selesaikan.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, S.H.):

Iya saya belum selesai, tadi kan sebenarnya harusnya interupsi ya? Artinya, bahwa hak bicara dikembalikan ke saya dulu dong.

Oke, mau apa pun itu kita perdebatkan, kalau regulasinya tertutup ya tidak akan ada. Jadi, kalau menurut saya, bisa tidak sih kita tidak melihat pelakunya, tapi ruang regulasi yang memang dibuka sehingga itu terjadi.

Krakatau Posco misalnya. Saya sempat berkomunikasi dengan Pak Dirjen kemarin, saya bingung. Memang betul, kenapa biji besi kita tidak dipakai? Kenapa *limestone* kita sampai hari ini cuma digunakan 30% dari 100% kebutuhan? Ada banyak yang disampaikan, tapi tetap saja itu tidak menjelaskan apa-apa buat saya. Nah, masalahnya adalah, yang salah yang impor atau regulator yang membuat peluang impor itu terbuka sedemikian besar? Kalau menurut saya regulatornya. Karena bisa atau tidak bisa tergantung regulator kok. Kalau regulator bilang tidak boleh, ya tidak boleh. Kalau kemudian regulator melarang lalu tetap terjadi, ya penyelundupan. Kan persoalannya di situ, Pimpinan. Kalau kemudian kita menyalahkan pelaku usaha, sementara regulator yang membuka peluang tidak kita pertanyakan kenapa peluang itu dibuka, itu juga tidak *fair*.

Nah, dalam hal ini saya mau nanya sebenarnya pada dirjen. Kenapa *limestone*, kenapa bijih besi itu tidak kita gunakan dalam negeri? Apa yang menyebabkan itu? Kenapa kita buka peluang dari luar? Kenapa memasukkan *limestone* dari luar bisa 0% pajak? Bahwa pengusaha mencari untung, ya pastilah. Tapi kenapa kemudian regulator tidak berpihak pada kedaulatan kita sendiri?

Nah itu yang menurut saya harusnya kita dapatkan dari rapat yang maha penting seperti sekarang, Pimpinan. Kenapa? ini menjawab seluruh persoalan kita terkait dengan impor. Khususnya impor baja, bahan baku baja dan sebagainya. Sanggup tidak kemudian misalnya kita membuat aturan agar impor itu punya beban pajak yang sama dibandingkan jika tidak.

Untuk itu menurut saya, Pimpinan, solusi dari perdebatan kita siang hari ini, kalau menurut saya diagendakan lagi, tapi seluruh pihak dihadirkan. Jadi nggak setengah-setengah seperti sekarang. Sekarang ini kita dengar Dirjen ILMATE mewakili perindustrian, kita dengar Krakatau Steel, tapi kita tidak mendengar Kementerian Keuangan, kita tidak mendengar Kementerian BUMN, kita tidak mendengar Kementerian Perdagangan yang memberikan kewenangan impor itu.

Nah, mungkin tidak sih kita rapat tapi komplit gitu loh. Jadi, kalau misalnya marah, marahnya juga komplit.

KETUA RAPAT :

Oke Pak Adian.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, S.H.):

Tidak sebagian per bagian.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Baik Pak Adian, sudah kita bisa tangkap pesannya.

Jadi, intinya adalah dalam rapat kali ini adalah untuk penguatan industri dalam negeri kan? Karena mitra kita adalah Kementerian Perindustrian. Dan yang kedua, kita harus garis bawah bahwa Krakatau Steel ini BUMN andalan negara kita sendiri. Dia harus menjadi contoh, bahwa dia akan menjadi garda terdepan dalam penguatan industri dalam negeri, bukan menjadi contoh ikut-ikutan jadi *trader* gitu loh.

Jadi, inilah makna rapat yang kita ingin dalam saat ini. Semangat untuk menguatkan industri dalam negeri, juga menata regulasi yang ada gitu loh. Apa saja yang perlu kita perkuat di dalam regulasi, kita juga ingin sampaikan kepada Dirjen ILMATE. Maupun juga Dirjen Daglu kan? Dirjen Perdagangan Luar Negeri juga sama yang seperti Pak Adian sampaikan bahwa itu salah satu pihak terkait. Kementerian Keuangan, Bea Cukai juga kan? Cuma dalam hal ini, kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Lamhot ada benarnya. Ketidakinginan untuk penguatan industri dalam negeri itu sangat nampak, gitu loh.

Jadi, ini Krakatau Steel lama-lama nggak usah jadi industri, jadi *trader* saja, jadi calo perdagangan baja saja dari luar negeri kan? Jadi apa fungsinya? Kalau pabrik-pabriknya ini kan, *blast furnace* itu dihentikan, kan? Alasannya merugi kan. Kalau terus-terusan dihentikan, lebih merugi lagi. Itu barang sudah investasi gede-gede, dihentikan. Apa nggak tambah rugi kan?

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Ketua.

KETUA RAPAT :

Jadi buat kita, kita agenda kan ke depan, kita rapatkan internal. Iya, silakan siapa?

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Tifatul, Tifatul.

KETUA RAPAT :

Pak, oh Pak Menteri, silakan Pak Tif, *monggo* Pak Menteri.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Terima kasih Mas Bambang, Pak Ketua dan teman-teman yang hadir secara fisik dan virtual semuanya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua, mudah-mudahan sehat semua ya.

Tadi ada ini Pak Ketua, ada bisik-bisik itu antara timnya Holyfield dulu dengan Mike Tyson tanding itu. Jadi, salah satu strategi dari Holyfield itu adalah memancing emosinya Tyson begitu, sehingga akhirnya Tyson terpancing emosinya dia justru melanggar peraturan. Jadi, dia kalahnya di situ, terpancing emosinya gitu. Nah, ini saya tidak menganalogikan dengan yang tadi, tapi artinya begini, ini kan kalau kita ingin mengambil kewenangan parlemen terhadap eksekutif ini kan kita bisa membentuk misalnya panja tadi yang disebutkan oleh beberapa teman-teman. Lebih lanjut lagi kita bisa membentuk audit investigasi, investigatif gitu, kita akan ada proses mencari, menemukan bukti-bukti secara sistematis, bahwa terjadi suatu perbuatan yang di luar hukum gitu ya, yang melanggar hukum gitu, paling pecahnya lagi kewenangan parlemen adalah membentuk pansus-pansus, Pak Ketua.

Jadi, saya setuju dengan beberapa teman sebelumnya bahwa memang tentang KS ini masih banyak yang gelap yang perlu kita buka begitu. Jadi, ini perlu agak *full* sedikit mohon maaf kalau saya sampaikan, karena kita ingin menggali ini semuanya gitu. Menggali ini semua, karena terus terang ini kan KS ini sudah hampir monopoli pajak di Indonesia ini, kok bisa sedemikian rupa kita tidak kenal isinya, dia katakan tidak *visible*, padahal unsur-unsur *visibility study* itu sendiri kan ada dari sisi *technical* aspeknya, *economical* aspeknya, *legallity* aspeknya, misalnya operasional dan sistem yang terkait aspeknya, jadi banyak gitu misalnya. Misalnya mau menghentikan *smelter* yang di Kalimantan Selatan tadi, itu kan *..(suara tidak jelas)..* tadi diungkapkan investasinya saja sudah 1,2 triliun mau dihentikan begitu. Nah, ini belum sempat kita gali. Jadi, sekali lagi Pak Ketua, memang masih banyak yang gelap tentang KS ini, saya sendiri berupaya mendengar dari awal penting, saya setuju apakah kita mengundang lebih lengkap lagi dirjen dan *stakeholder* yang terkait, yang penting ini untuk Komisi VII. Menurut saya ini sesuatu yang sangat penting. Saya setuju dengan Mas Bambang bahwa bagaimana impor ini dikurangi, bagaimana produksi kita ditingkatkan. Mudah-mudahan, ini memang masih mendung-mendung, anak burung berbulu coklat, biar mendung tetap semangat ini, Pak Ketua ya.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jadi, intinya bahwa dalam kesimpulan rapat hari ini tidak ada kesimpulan ya, intinya kita sepakati bahwa kita akan lakukan investigasi khusus untuk Krakatau Steel, termasuk juga kita akan minta dari Dirjen Bea Cukai dan juga pajaknya, apakah betul yang dia sampaikan bahwa keinginan untuk penguatan industri dalam negeri, ataukah entah data yang ada di atau yang beredar di tengah masyarakat kan. Kita sering mendengar bahwa KS ini salah satu *trader*, kan lucu, itu yang tadi saya sampaikan kenapa saya bilang jangan sampai maling teriak maling, kita menuduh ke orang lain ini, kita semangatnya ingin

bersih, saya yakin semua sama. Cuma dalam artian mereka yang menginginkan penguatan industri dalam negeri tapi mereka juga yang menggenjot impor barang dari luar negeri kan lucu begitu lho, teriak-teriak, ini tidak sesuai dengan semangat Presiden untuk penguatan industri dalam negeri. Biji besinya banyak di Indonesia kan, bertebaran di mana-mana, bahkan Indonesia ini salah satu negara penghasil biji besi terbesar di dunia, tapi lucu kita malah impor, gitu loh. Ada apa? Apakah ada sesuatu, apa yang disebut Pak Lamhot, apakah itu nyata kartel? Dan kita berharap Krakatau Steel jangan juga ikutan di dalam lingkaran itu begitu lho, kita Krakatau Steel harus ada terdepan di garda terdepan untuk penguasaan industri baja dalam negeri, terlebih Krakatau Steel ini adalah anak usaha negara gitu lho, harusnya dia yang punya semangat, bukan dia berusaha menghentikan industri-industri peleburannya kan, malah ini akhirnya kan *trader*, kan lucu. Satu sisi dia bilang industrinya melemah, tapi satu sisi untung. Nah, untungnya dari mana kalau bukan dari *trader* gitu kan, ini kan jangan sampai jadi perusahaan calo ini kan gitu lho. Krakatau Steel itu harus jadi industri.

F-PG (IR. LAMHOT SINAGA):

Pimpinan, sedikit.

Tadi, kan kita dengar sendiri tadi, Pimpinan, kita dengar sendiri tadi Pak Dirut mengatakan ini kami lagi menunggu PMK-nya untuk meminta perlindungan impor HRC-nya, produknya kan dia cuma 2 dia bilang, HRC satu, satu lagi apa tadi dia bilang gitu. Dengan itu alasan dia tidak pakai *sponge* lagi sehingga yang Kalsel itu jadi mangkrak, kan lucu dong. Dia sendiri yang meminta perlindungan impor, kan kacau negara ini begini, masa BUMN terbesar di bidang baja meminta perlindungan impor HRC dengan meminta biaya masuk anti *dumping*, kan ini nalar saya nggak jalan ini, nggak logika saya ini, ada apa ini? Jadi, kalau dibilang ini aspek regulator saya kira dia sendiri juga bisa impor kok, terus ngapain dia mau ngimpor? Pabrik baja biji besi kita dimatikan. Nah, ini kan sirkulasi yang menurut saya terindikasi ini adalah kartel, mematikan pengolahan biji besinya, di sisi lain dia mengimpor. Kan ini yang saya bilang ini adalah sebuah siklus mata rantai yang tanda tanya besar gitu. Kalau kita lihat lagi sikap Menteri BUMN kadang-kadang bilang untung, kadang-kadang bilang mau bangkrut, kan aneh ini kan, mana yang jadi pegangan kita gitu? Kalaupun Krakatau Steel untung, untungnya bukan karena produksinya, tapi karena kebetulan ada KS Posco, diuntungkanlah dia mengimpor biji besi dari Brazil dan dari Australia, kan kacau ini.

Nah, kalau kita simpulkan tadi itulah yang membuat sikap dia sangat reaktif, ada hal yang dia tutupi begitu, pas yang dibilang Pak Tiffatul tadi, ketika Mike Tyson itu emosinya naik, emosinya karena Pak Bambang pimpin yang benar gitu lho ya kan. Nah, karena dia merasa ada membungkus sesuatu hal reaktif dia emosinya naik gitu. Jadi, saya kira sudah sangat jelas Pimpinan.

F-PDIP (DONY MARYADI OEKON/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Sedikit, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silahkan Pak Dony.

F-PDIP (DONY MARYADI OEKON/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Saya pikir ini dari pembicaraan kita hari ini, kita dari tadi diskusi yang terjadi di antara kita ini. Saya berharap kalau bisa Pak Dirjen memberikan masukan atau *closing statement* dari Pak Dirjen supaya jelas ini Pak. Kita arahnya mau ke mana, apa yang mau kita lakukan untuk menjelaskan permasalahan yang ada sekarang hari ini.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Pak Dirjen, *monggo* Pak Dirjen, kita sekalian *closing statement*.

DIRJEN ILMATE (TAUFIEK BAWAZIER) :

Baik.

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Jadi, Komisi VII buat saya adalah pahlawan untuk memperkuat industri nasional. Jadi, saya sepakat dalam konteks penguatannya. Tadi yang disampaikan Pak Adian juga betul. Jadi, *rule of thumb-nya* impor itu sebetulnya pertama di dalam negeri tidak bisa produksi. Yang kedua, produksi tapi tapi tidak cukup. Yang ketiga karena ada spek-spek khusus yang kita secara kemampuan kita belum bisa membuat, itu tiga. Buat kami dukungan untuk memperkuat industri ini, lebih kuat lagi industri baja nasional tadi dari hulu sampai hilir itu *supply and demand*.

Jadi, saya sepakat tadi Pak Adian memang harus kalau mau memotret motret semua, jadi ada dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan. Terus kalau perlu kalau dibilang peralihan *circumvention-circumvention* itu ada di KSU sama Bea Cukai, jadi ini komplit. Tapi kalau dari secara kita, kita secara teknokratik kita sudah ukur sebenarnya *supply demand*. Jadi, kalau industri baja ini tidak dikasih impor dia akan mati, Pak. Oleh karena itu, kami sangat berhati-hati untuk menghitung *supply demand-nya*. Jadi, *utilisasinya* tahun 2020 itu 30%, sekarang 67% berarti harus ada tambahan impor sebetulnya 50%, tapi kami bisa mengendalikan sampai 27%. Saya kasih logika begini, kalau yang industri sederhana, Pak. Kalau orang itu memproduksi sarung, dia tidak boleh industri itu mengimpor sarung, tapi dia harus mengimpor benang, kalau dia industri benang dia tidak boleh impor benang tapi dia harus impor kapas. Jadi, itulah yang kami terapkan di industri baja nasional secara sektoral, sehingga *supply demand* ini kami bisa menempuh pertumbuhan

industri. Substitusi impor kita jalankan karena program Pak Menteri dan Pak Presiden.

Jadi, kalau *baseline* yang mau dipakai adalah tahun 2019, karena sebelumnya itu tinggi-tinggi sekali. Jadi kami bedah, kami sensus, dan memang kita secara kebutuhan nasional itu *engineering steell* kita tidak punya. Kemarin kita mengeluarkan kebijakan PPNBM itu juga namanya kebutuhan untuk otomotif juga kita tidak mampu, ya mampu ada sedikit ada *join* juga Krakatau Steel dengan Jepang itu, apa KSS itu. Itu ada cuma kapasitas 500 ribu ton. Tapi secara nasional kami sepakat.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Pimpinan, mau nanya Pak Dirjen, berarti Krakatau Steel tidak boleh dong harusnya impor baja? Dia sebagai industri baja harusnya dia tidak boleh impor baja dong harusnya.

DIRJEN ILMATE (TAUFIEK BAWAZIER) :

Karena ini bahan baku semua yang industri dalam negeri boleh Pak, bahan baku yah.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Bukan bahan jadi ya?

DIRJEN ILMATE (TAUFIEK BAWAZIER) :

Bukan, kalau bahan jadi kita tidak memberikan sama sekali karena itu hanya akan.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Dia tadi bilang, dia kan mau minta perlindungan import HRC.

DIRJEN ILMATE (TAUFIEK BAWAZIER) :

Jadi begini, kalau misalnya HRC itu jadi ada namanya fiskal atau tarif itu sebetulnya kalau dari sisi dunia itu yang paling menguasai baja itu kan di Cina, hampir 1,2 miliar ton, kita Cuma berapa 7 tonlah, yang nomor 2 itu India 110 ton, terus Korea Selatan sekitar 70 juta ton, 110 juta ton, baru Korea Selatan, baru Inggris, eh apa namanya Rusia, itu kira-kira yang besar-besar. Kita ini hanya cuma, kita kebutuhan nasional sekitar 17 juta ton, impor kita 13 juta ton. Dalam impor itu ada 2 sebetulnya, yang dikenakan Lartas. Jadi, yang kita kendalikan itu yang tadi HRC, CRC, BjLAS itu kita Lartas, HRP dan sebagainya. Yang tidak Lartas itu slab dan *iron-iron* tadi yang ditanyakan Pak Adian tadi itu *limestone*, itu nanti Dirjen Minerba mungkin bisa tahu kalau itu di-*stop* bisa saja di-*stop* jadi yang tidak di-Lartas itu yang tidak di Lartas itu data kami kita bisa tunjukkan.

Jadi, data kami lengkap Pak Pimpinan dan para anggota. Jadi, kalau mau dijadikan referensi kami punya namanya SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional). Jadi, siapa pun yang mau impor itu *request*-nya masuk dari situ kita hitung. Kita tidak pernah memberikan kapasitas, tapi yang dia produksi, yang diproduksi berapa itu yang kita berikan. Dan kami pernah waktu saya duduk di ILMATE, saya perintahkan untuk sensus. Jadi, ada 200 industri baja yang memproduksi baja. Jadi, kebutuhan baja banyak yang saya sampaikan tadi, ada perminyakan, ada otomotif, elektronik itu butuh baja juga, tapi yang *engeenering steel* itu hampir kita tidak bisa buat. Dan itulah yang kita impor yang sebetulnya terukur. Dan yang tadi HRC yaitu tadi yang *logic* tadi yang punya pabrik sarung, kapas dan sebagainya itu kita atur di situ berapa kapasitasnya. Dan kalau impornya nasional kebutuhan. Jadi, saya ukur juga kebutuhannya, kebutuhan itu adalah produksi dikurangi ekspor ditambah impor, itu kebutuhan nasional. Jadi, kalau industri nasional bisa memproduksi kebutuhan nasionalnya 10, produksi nasionalnya 5, saya tidak berikan impor 5 tapi saya berikan 3, 2-nya untuk supaya industri nasional naik utilitasnya.

Itulah konsep kita untuk menaikkan *leverage*, dan tidak mungkin kalau misalnya industri. Jujur saja makanya saya dari dulu kan pernah ngomong hulunisasi, hulunisasi kalau kita kuat. Cina itu tidak punya ini, dia impor dari Australia, FA-nya 60%. Jadi, itu kalau ada konsep kita adalah nilai tambah, kalau itu memang penuh di dalam negeri ya kita tutup saja impornya untuk *nationalism*, tapi faktanya kalau kita tidak memberikan bahan baku pabrik itu akan tutup, pengangguran, *social problem* dan sebagainya, pemerintah yang salah. Jadi, kami cukup *wise* dan data apa pun ada di SIINAS, kami terbuka, itulah yang diminta, yang di-*request*. Dan kami sering potong-potong yang katanya yang sebelum-sebelumnya itu kami potong dengan basis *reference* apa namanya tadi sensus tadi, dan kami *update* terus, dan ada juga tambahan investasi.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Pak Dirjen sedikit, itu terkait penutupan *blast furnace* itu menurut Pak Dirjen lebih merugikan ditutup atukah lebih baik kita aktifkan, Pak Dirjen?

DIRJEN ILMATE (TAUFIEK BAWAZIER) :

Mohon izin Pimpinan, saya tidak bisa menjawab itu, tapi buat saya dengan.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Industrinya dari sisi peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

DIRJEN ILMATE (TAUFIEK BAWAZIER) :

Ya kalau hitungan kita. Kita butuh 5 kali, 15 *furnace*. Jadi, yang akan dibangun posco itu nanti 2026 ditambihin 3 juta Krakatau Posco, tidak tahu sahamnya sekarang sudah dibeli Krakatau berapa persen saya tidak mengikuti karena bukan otoritas saya. Jadi, kalau lihat dari kalkulasi yang disampaikan

Pak Pimpinan Pak Ketua tadi Pak Bambang itu kita butuh 5 kali, 15 *furnace* dengan kapasitas 1,2 juta ton. Jadi, kalau itu ada otomatis kita akan menurunkan impor, gitu kalau hitungan teknokratis, itu di atas kertas kebutuhan nasional. Ya saya tidak tahu siapa yang mau investasi apakah perusahaan swasta diberikan kesempatan juga atau perusahaan BUMN juga yang lain saya tidak masuk ke wilayah itu dan saya tidak punya otoritas. Tapi prinsip kalau kami dari industri nilai tambah kita dorong dan juga kita juga harus berhati-hati jangan sampai bahan baku itu tidak cukup, karena di undang-undang sudah disebutkan bahwa pemerintah menjamin bahan baku, itu yang kita lakukan.

Izin Pimpinan, itu mungkin *closing statement* saya.

Terima kasih.

F-PD (SARTONO HUTOMO):

Pimpinan, Sartono Hutomo.

KETUA RAPAT:

Iya, silakan.

F-PD (SARTONO HUTOMO):

Sebelum menutup, tadi ada *goro-goro*. Ke depan saya pikir perlu juga Pimpinan untuk disampaikan di dalam tata beracara untuk rapat kerja atau rapat dengar pendapat, karena kalau menghadapi yang tidak paham betul tentang aturan, tentang tata beracara, nilai etika, akhirnya kaya *saur manuk* gitu, belum selesai dipotong dan sebagainya.

Saya ingin menanyakan, izin Pimpinan yang saya hormati, kepada Pak Dirjen. Pak Dirjen saya me-*refresh* saja, pada tahun 2001 itu kan Pak Presiden meresmikan pabrik industri baja canggih, *hot strip mill* PT. Krakatau Steel di Cirebon Banten pada Selasa 2001 tanggal 21 bulan 9. Waktu itu Presiden Jokowi berharap dengan berdirinya pabrik baja ini kebutuhan baja dalam negeri dapat terpenuhi dan tidak perlu impor. Nah, ini kan memberikan suatu lompatan yang luar biasa saya pikir waktu itu. Nah, jadi tidak ada lagi impor-impor yang kita lakukan, ini yang kita harapkan, sehingga sekali lagi akan menekan angka import baja negara kita yang saat ini berada pada peringkat kedua komunitas impor Indonesia, itu ucap Pak Presiden. Nah, ini sampai di mana ini perkembangannya ini Pak Dirjen? Sampai di mana, terus mengapa sampai tadi yang apa, tadi Mas Bambang menyampaikan bahwa gagasan berdirinya Krakatau Steel ini kan gagasan besarnya untuk mencukupi kebutuhan industri baja dalam negeri, tapi juga dengan dinamika permasalahan yang kompleks mungkin tidak bisa menghadapi itu, akhirnya ikut-ikutanlah menjadi *trader* yang dapat untung untuk bisa *survive*. Yang saya tanyakan ialah perkembangannya bagaimana itu yang diresmikan Bapak Presiden yang akan mengantisipasi daripada industri baja dalam negeri?

Begitu, Pak Dirjen.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DIRJEN ILMATE (TAUFIEK BAWAZIER) :

Baik, Pak Sartono.

Jadi izin, Pak Pimpinan. Jadi, mungkin sedikit saja jadi kalau industri baja Krakatau itu sebetulnya ada 2 sebetulnya kalau menurut kami ya. Jadi, Krakatau Steel Tbk dan Krakatau Posco, jadi yang HSM 2 itu adalah *plan* dari Krakatau Posco. Jadi, kalau saya bisa lihat di, lanjut, ada saya punya ada *brief* sedikit jadi HSM 2 itu *Hot Strip Mill* 2 itu dengan kapasitas 1,5 juta ton itu adalah Krakatau Posco, dan Krakatau Steel Tbk tadi punya saham di situ 30%, rencananya kemarin itu mau diambil 50%, kalau bisa 100% *alhamdulillah*, Korea. Jadi yang Krakatau Steel, saya kalau tidak salah ada, coba di *slide* berikutnya, saya sudah *picture* semua hulu nasional, tapi mudah-mudahan masih ada waktu, ini kan Covid juga. Terus, lanjut. Lanjut terus, terus, ke belakang.

Jadi, kalau saya boleh *picture*, hulu nasional itu tadi yang Krakatau Steel sendiri itu ada namanya *Hot Strip Mill* 1, itu kapasitas 2,4 juta ton, itu bangunnya sudah lama juga. Terus kemudian CRC-nya itu 800 ribu ton, terus yang BjLAS *join* dengan Jepang itu 500 ribu ton. Krakatau Posco itu yang *flat*-nya itu untuk 10 juta ton baja, itu HSM 2 yang diresmikan Bapak Presiden, itu Krakatau Steel Tbk ada saham di situ, eksisting yang saya dengar, karena saya tidak menangani BUMN jadi saya tidak tahu. Kalau tahun sebelum 1998 mungkin dulu kita menangani BUMN, ini sahamnya 30%. Di situ juga ada *plan* tahun ini mau bikin namanya CRC 2 dengan kapasitas kalau tidak salah sekitar 2, sebentar, yang CRC 2 itu mau dibangun, itu sekitar 2,4 juta ton namanya CRM 2, itu pembangunan 2022 diperkirakan 2024, yang disampaikan Pak Pimpinan Pak Bambang tadi Krakatau Posco juga *plan* untuk membangun 3 juta ton *blast furnace* lagi, tapi nanti 2024. Jadi, saya punya sudah saya gambarkan nanti bisa divalidasi.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Izin Pimpinan, dengan Rico.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Interaktif dengan Pak Dirjen.

KETUA RAPAT:

Monggo, monggo.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Saya sedikit bingung ini Pak Dirjen. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dirut KS dan apa yang disampaikan barusan oleh Bapak. Yang dari KS tadi bilang mau ditutup, mau dikurangi, tapi tadi Bapak bilang nanti tahun 2024 mungkin akan dibangun lagi. Nah, ini apa tidak membuat negara jadi semakin bangkrut Pak? Di sini ditutup habis, habis itu bangun lagi, nanti tutup lagi, bangun lagi, ini pakai duit semua kan duit negara. Jadi, muncul ini tanda tanya besar di sini, ada apa sebenarnya? Mungkin Bapak bisa kasih saya kepastian, tadi kan ditanyakan oleh Pak Pimpinan Pak Bambang bahwa apakah sebaiknya ini diteruskan atau ditutup, lalu Bapak tidak menjawab sebaiknya dibiarkan berproduksi, tapi Bapak menjawabnya lain. Maksud saya adalah mungkin Bapak pertegas supaya saya menjadi nyaman, apakah ini ditutup, jawabannya ditutup atau sebaiknya jangan ditutup, jawabannya cuma ditutup atau jangan ditutup terkait dengan apa yang tadi Bapak jelaskan bahwa tahun 2024 nanti akan dibutuhkan lagi begitu.

Terima kasih, Pimpinan.

DIRJEN ILMATE (TAUFIEK BAWAZIER) :

Iya, izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Dirjen.

DIRJEN ILMATE (TAUFIEK BAWAZIER) :

Di 2024 itu punya Krakatau Posco Pak, jadi ada 2 nih Krakatau Steel Tbk sama Krakatau Posco. Krakatau Posco sahamnya Krakatau Steel ada 30% yang saya tahu hari ini, tapi rencananya kalau tidak salah mau dibeli 50%, cuma saya tidak tahu terakhir. Ya kalau misalnya Posco punya *plan* untuk bangun *blast furnace* itu karena dia statusnya kan masih setengah PMA-lah, itu manajemennya di dia, manajemen Posco itu bukan manajemennya teman-teman. Kalau teman-teman memutuskan itu mungkin ada koridor tadi, kalau di operasi, kalau saya kebutuhan bahan baku ya dihidupkan saja, tapi kan dia takut juga nanti begitu dihitung nanti rugi, kalau rugi kan berarti harus bertanggung jawab dong terhadap keuangan negara. Ini yang harus, ini dilema Pak.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Iya memang dilema, Pak. Cuma yang tidak, saya pikir kok di sana bisa untung di sini bisa rugi gitu, gimana ceritanya Pak? Padahal ini kerjaannya kurang lebih mirip-mirip sama, walaupun Bapak memang terpisah ya untuk bahan bakunya saja, tapi saya lagi berfikir kok di dalam industri ini, yang satu

dengan ada PMA tadi, yang satu memang milik negara, kok negara punya bisa rugi, kok PMA bisa untung itu bagaimana ceritanya?

Terima kasih, Pimpinan.

DIRJEN ILMATE (TAUFIEK BAWAZIER) :

Izin, Pimpinan.

Jadi kalau masalah manajemen saya tidak mau masuk di situ, Pak. Jadi izin ya, itu masalah kepiawaian orang terefisiensi dalam industri. Ini mohon izin saya berikan *picture* ini tapi saya mohon ini untuk Komisi VII saja. Jadi, bisa dipelajari. Jadi, ini potret sebetulnya untuk yang paling hulu, itu di situ ada 4 pemain sebetulnya, ada Krakatau Steel, Krakatau Posco, ada Garuda Raja Paksi, ada Dexin Steel, Dexin Steel itu untuk konsumsi mereka sendiri sebetulnya, ada sedikit yang dijual.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Sebentar Pak Dirjen, ini Garuda Raja Paksi yang kemarin kasus SNI itu ya yang 2,6 juta itu?

DIRJEN ILMATE (TAUFIEK BAWAZIER) :

Cuma dia spesialis di *scrap*, bukan yang *iron ore*. Kalau yang *iron ore* itu yang Krakatau Posco, itu dia bangun sampai *slab*. Nah, ini kuncinya dari hulu itu sebetulnya di *slab*-nya, *slab* itu yang nanti untuk produksi HRC yang tadi *long product* sama *flat product* HRC, HRP untuk plat-plat kapal, terus yang kedua CRC, CRC untuk kontruksi rumah semuanya, itu ada di situ. Kalau itunya tidak diproduksi ya impor. Nah, impor yang untuk itu tidak di-Lartas.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Pak Dirjen, itu yang besi siku, mohon maaf saya potong sebentar, besi siku yang diimpor yang terus dipalsukan SNI-nya oleh atas nama Garuda itu kan, Garuda apa namanya ini, Garuda Paksi apa itulah, itu masuknya bahan baku atau barang jadi, Pak Dirjen?

DIRJEN ILMATE (TAUFIEK BAWAZIER) :

Izin Pak, saya tidak mendalami masalah itu, waktu itu ada orang nanya SNI-nya, SNI ya kita sampaikan.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Saya bukan SNI-nya, maksudnya besi siku itu barang jadi kan?

DIRJEN ILMATE (TAUFIEK BAWAZIER) :

Ada yang barang jadi ya.

KETUA RAPAT:

Pak Dony mau ada yang ditambahkan, silakan.

F-PDIP (DONY MARYADI OEKON/WAKIL KETUA KOMISI VI DPRRI):

Tidak, tadi saya melihat ada sesuatu kejanggalan mengenai ya tadi seperti Pak Rico bilang, dibangun, di-*stop*, ini bangun di-*stop*, tapi ini jalan. Ini katanya menurut saya kan yang salah apanya ini? Kalau sudah tahu kalau kita bangun *blast furnace* ini sendiri rugi kenapa ini masih terus berjalan? Begitu yah Pak Lamhot ya kurang lebih ya. Cuma sekarang yang jadi pertanyaan saya berarti kesalahan dari *planning*. Kalau dia masih menganggap ini untung berarti *planning* yang Krakatau Steel dan yang di Kalimantan ini salah dari awal. Dari awal sudah salah mereka membuat *planning*-nya. Sampai tadi sempat, mungkin tidak tahu tadi Pak Dirut mengatakan paling *simple* terlalu jauh jalannya 20 kilo, 30 kilo, *it's very simple*, kenapa jauh dibangun? Dari awal kenapa tahu jauh, tidak ngumpet gitu kan, sesuatu yang tidak terlihat, ini sangat terlihat jauh. Nah, ini kita kan harus jadi tanda tanya besar.

Nah, itu mungkin saya pikir, bisnis ini menguntungkan, kita yakin bisnis ini karena orang masih mau bangun, tapi kenapa ini tidak jadi, kenapa ini di-*stop*, ini harus jelas, harus lebih dalam mungkin saya pikir. Itu yang sebetulnya kita ingin dalami, Pak. Nanti mohon bantuannya kita dukungan, jadi semua lini juga harus hadir di sini, dari Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, dan juga si pelaku bisnis itu sendiri.

Saya pikir itu, Pimpinan.

Terima kasih.

F-PG (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI, B.A., M.Sc.):

Izin Pimpinan sebelum.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Kalaupun ada produksi Krakatau Steel hari ini, itu adalah karena adanya KS Posco, bahkan kemarin yang diresmikan oleh Presiden itu Pak Sartono, itu adalah KS Posco, Presiden pun ditipu. Kalau kita baca berita itu seolah-olah yang diresmikan Presiden itu adalah Krakatau Steel.

KETUA RAPAT:

Yang nipu siapa ini Pak?

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Lah faktanya kan begitu.

KETUA RAPAT:

Tidak, yang menipu ini siapa kira-kira?

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Lho siapa? Kenapa di berita itu semua yang diresmikan Presiden adalah, sampai ada Menteri BUMN bla, bla, bla gitu, padahal kan faktanya itu semua produksinya KS Posco kan, bukan industrinya Krakatau Steel.

KETUA RAPAT:

Nah ini juga harus ada ..(*suara tidak jelas*)..

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Makanya itu tadi saya bilang ada apa, ini tadi kan Pak Rico sudah nanya, ini *blast furnace* bagaimana gini, kan, ini waduh, ini berat ini Bos, ngeri ini, bahkan untuk diresmikan saja kemarin Presiden ditipu, dan itu kan tercermin dari sikap mereka yang sangat reaktif hari ini, itu lho, jadi itu pesannya.

Nah, kalau saya boleh cerita sedikit Pak Dony Oekon. Dulu Kalimantan Selatan itu memang dibangun adalah tujuannya bagaimana kita mengurangi importasi biji besi. Di Kalimantan Selatan itu memang *grade*-nya tidak semua sama, ada yang beberapa hektar itu *grade*-nya sampai di atas 60 yang memungkinkan *grade* ini masuk spek Krakatau Steel, tapi tidak besar, tapi yang selebihnya harus ada industri antara untuk mengolah kadar Fe-nya itu lebih tinggi kadar besinya. Nah, ada yang terganggu Pak, impor dari biji besi ini kan terganggu sehingga ini dibuat mangkrak. Harusnya masih ada lagi industri antara untuk pengolahan biji besi supaya *grade* Fe-nya itu lebih tinggi lagi, itu yang tidak dilakukan. Nah, tapi kalau itu dilakukan ini yang importasi Fe biji besi ini terganggu Pak. Nah, itu yang tidak mereka lakukan, gitu kira-kira.

KETUA RAPAT:

Baik.

Mungkin Mba Roro, *monggo*.

F-PG (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI, B.A., M.Sc.):

Iya, boleh.

Terima kasih, Pimpinan.

Saya hanya ingin mungkin menegaskan saja ya bahwasanya pada intinya kan kita sebetulnya ingin memperkuat produksi baja dalam negeri, dan tentunya ada berbagai macam upaya yang harus ditelusuri termasuk tadi Pimpinan juga sudah menyampaikan. Saya sih *support* karena dengan *blast*

furnace yang mangkrak dan lain sebagainya di mana hari ini kita belum sebetulnya mendapatkan penjelasan yang dibutuhkan.

Saya rasa ada baiknya kita nanti walaupun mengadakan agenda berikutnya itu betul-betul mengundang lintas sektoralnya begitu. Jadi, seluruh pihak yang terlibat dalam isu ini harus dilibatkan agar kita mendapatkan konkritnya, solusi yang memang butuh kita implementasikan ke depannya. Nah, berhubung di sini ada Pak Dirjen, saya sekalian ingin mengetahui secara makronya Pak Dirjen. Jadi, saya ingin tahu kebutuhan dalam negeri untuk baja *alloy* ataupun baja non-*alloy*. Mohon maaf saya justru ingin tahu definisinya dulu Pak, jadi apa perbedaan di antara kedua itu, tapi pada intinya kebutuhan kita itu berapa sih sebetulnya?

Lalu kemudian di samping itu juga apakah ada *roadmap* dari kementerian sendiri berkaitan mengenai bagaimana ke depannya kita bisa mendorong produksi tersebut di dalam negeri. Jadi, *roadmap* itu saya belum lihat, tetapi yang saya lihat tadi di *slide* nomor 3 berkaitan dengan kemampuan produksinya. Jadi, *we know* bahwa kita mempunyai kemampuan, tetapi apakah ada target-target tertentu yang sudah diset oleh kementerian di mana itu juga bisa menjadi patokan, maka ketika kita menelusuri beberapa isu-isu yang sedang berkembang seperti tadi yang sudah kita ketahui itu secara *holistic* kita juga bisa memetakan dengan baik.

Sekian saja sih dari saya, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih Mba Roro.

Inti dari semua adalah tadi paparan Pak Dirjen, itu poinnya Pak, karena semangat Presiden Jokowi kan ingin memperkuat industri baja dalam negeri. Dirjen ILMATE yang membawahi seluruh perindustrian khususnya industri baja. Beliau menyampaikan untuk kebutuhan nasional perlu 15 *furnace*, ini Krakatau Steel ini perlu kita suruh belajar ke Pegadaian, dia menutup *blast furnace* tapi satu sisi partnernya Krakatau Posco mau bikin kan, ini kan sesuatu kan, menyelesaikan masalah tidak seperti Pegadaian. Kalau Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah, kalau ini meninggalkan masalah membuat masalah.

Jadi, saya pikir apa yang disampaikan Pak Dirjen kebutuhan 15 *furnace* itu sangat masuk akal. Terlebih Pak Dirjen memang membidangi di situ kan. Jadi, kita ingin dalami, kita ingin investigasi, kenapa *blast furnace* yang ada saat ini harus dihentikan? Kalau alasan rugi, apakah ruginya sedemikian, apakah lebih merugi mana rugi dihentikan ataukah membuat baru gitu loh. Ini kan sesuatu yang unik, atau kan lebih menguntungkan memang ini ada kesengajaan biar impor semakin deras. Apalagi kita tahu beberapa bulan

terakhir Pak Dirjen kan kita sering diskusi. Beberapa bulan terakhir begitu maraknya impor ketika semua tahu bahwa Indonesia dalam waktu dekat ada keinginan untuk membuat ibukota baru, itu kebutuhan bajanya luar biasa. Jadi, kami ada, patut diduga maraknya impor baja salah satunya untuk konsumsi di ibukota negara baru. Jadi, kami tidak menginginkan dengan alasan kebutuhan, terus industri dalam negeri dimatikan.

Kalau tadi alasannya ini merugi setiap bulan kita terbebani oleh, yang namanya di dalam hukum pidana kan selama kerugian itu kerugian bisnis tidak bisa dipidanakan. Kalau orang berbisnis rugi dipidana itu semua orang tidak bakalan ada yang bisnis Pak gitu loh, kecuali memang ada keinginan untuk korupsi gitu loh, tapi kalau itu murni kerugian bisnis, apalagi untuk penugasan negara untuk memperkuat industri dalam negeri itu tidak masalah kan, walaupun kita harus meminimalisir kerugian tersebut. Tapi bukan berarti dengan alasan merugi terus ditutup, terus habis itu gencar impor kan. Apalagi bentar lagi mau buat ibukota negara ini butuh bajanya banyak. Ini pemainnya kita tahu semua, kita sudah dapat masukan dari beberapa NGO kan, terkait permainan kartel-kartel baja ini, mereka memasukkan baja dari 4 bulan yang lalu, banjir sekali itu baja impor kan, karena ini tujuannya untuk itu, sekarang sudah mulai diketatin, sebulan terkahir inilah. Betul ya, Pak? Apalagi di bulan November dan Desember itu sudah kayak banjir, bukan lagi deras, banjir, begitu barang sudah masuk semua sekarang mulai ketat, barang mereka sudah ada semua kan. Nah, inilah yang kita ingin telusuri ke depan, kita tidak ingin Krakatau Steel sebagai ujung tombak negara Indonesia di se-industri baja, tapi kita tidak ingin juga Krakatau Steel jadi ujung tombok juga kan, kita 2 sisi ini harus kita ini, ujung tombak dan ujung tombok tidak boleh dijalankan Krakatau Steel semua, ujung tombak sih boleh untuk industrinya, tapi jangan ujung tombak untuk *trader*-nya gitu lho.

Nah, untuk itu karena kita ini, intinya kita sangat kecewa sekali dengan Dirut Krakatau Steel. Petinggi-petinggi BUMN macam begini yang tidak menghargai DPR sebaiknya pemerintah harus evaluasi, karena hal ini dia harus tahu bahwa di Indonesia kita tidak ada kekuatan, yang paling ini adalah kekuatan kita sama, kita saling mendengar, saling memberi masukan, jangan arogan, terkesan sudah kaya dia yang punya republik ini kan gitu. Jadi, kita ingin sama-sama membangun Indonesia, kita sama-sama menjalankan tugas konstitusional kita. Saya berterima kasih kepada Pak Dirjen atas kehadiran dan juga masukannya, dan terkhusus tadi soal 15 *furnace* yang harus didirikan di Indonesia, untuk pemenuhan industri dalam negeri iya kan.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Pimpinan, bisa minta waktu?

KETUA RAPAT:

Boleh, silakan.

Kita mau tutup Pak Adian, silakan.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Ini tadi soal yang di Kalimantan ya. Dari tadi itu saya baca ya, itu dibangun 2008, mulai produksi 12 November 2012, lalu ditutup bulan Juli 2015. Jadi, saya tertarik karena Pak Dony Oekon tadi menyampaikan perhitungan jarak dan sebagainya. Kalau menurut saya bisa tidak ya kita mengagendakan satu rapat tersendiri untuk khusus membicarakan itu, ternyata lebih lama ngebangunnya dibandingkan produksinya. Produksinya itu hitungan saya tidak sampai 35 bulan tahun 2015, Juli 2015 itu produksinya dihentikan. Sementara dibangunnya dari 2008. 2008, 2009, 2010 bangunnya 6 tahun, eh bangunnya 5 tahun produksinya 35 bulan. Saya ini lihat kenapa jadi menarik ya, ini salah hitung atau ada kepentingan, 35 bulan untuk produksi, menurut saya ini ada yang salah, itu pertama.

Terus yang kedua, MJIS itu kan perusahaan patungan antara Krakatau Steel dengan Antam, kalau di berkasnya kan saya baca seperti itu, mungkin tidak kita memanggil keduanya? Termasuk memanggil Menteri Perindustriannya kenapa berhenti dalam memproduksi yang 35 bulan, 2009, 2010, 2011, 2012 bangunnya 4 tahun, Pimpinan, produksinya tidak sampai 3 tahun. Nah melalui rapat ini saya minta perlu kita dalam suatu waktu kenapa itu terjadi. Paling tidak begini, paling tidak kalau Krakatau Posco misalnya mau mengembangkan *blast furnace* lagi, bisa tidak kita belajar dari sini. Itulah yang paling minimal kita mendapatkan pembelajaran tanpa harus mencari salah siapa, kesalahan ini di periode siapa, tidak masuk pada wilayah itu, tapi kayaknya kita harus menghitung lebih cermat.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Adian.

Intinya dalam rapat ini agendanya salah satu terkait *smelter* yang di Kalsel dan juga *blast furnace* itu, dan dua-duanya ini berhenti, mangkrak dua-duanya. Betul ya Pak Dirjen ya? Baik yang Kalsel maupun yang *blast furnace* itu. Nah kita ke depan kita akan agendakan khusus untuk mendalami 2 hal ini, yaitu *smelter* Kalimantan Selatan kenapa dihentikan alasannya apa? Apakah memang sama seperti yang tadi? Supaya semua tidak ada produksi dalam negeri begitu loh, kalau memang tujuannya begitu ya sudah ngapain kalian ini gitu loh, bikin-bikin *smelter* buang-buang duit kan, kalau hanya alasan itu. Makanya kita akan dalam 2 hal tersebut, khusus penghentian 2 hal ini, karena ini investasinya sudah gede banget. Investasi gede banget untuk *smelter* Kalsel dan juga *blast furnace* yang ada di Krakatau Steel. Jangan sampai dengan alasan kerugian untuk memperlancar teknik lain kan. Jadi, ibaratnya kantong kanan ditutup, kantong kiri dibuka gitu loh. Kita ingin bahwa memang semuanya harus jelas, terang benderang, apa penghentiannya, alasannya apa bukan untuk aspek-aspek lain.

Mungkin itu kita akan agendakan ke depan Pak Dirjen. Mohon ke depan juga kesiapannya untuk terkait membahas 2 hal ini, karena kita ingin

membuktikan bahwa pemerintah yang ada saat ini benar-benar ingin mandiri dari semua sektor termasuk baja dalam negeri.

Mungkin itu dari saya. Sebelumnya silakan Pak Dirjen kami berikan kesempatan untuk *closing statement*.

DIRJEN ILMATE (TAUFIEK BAWAZIER):

Iya, saya terima kasih saja terhadap Komisi VII semuanya jadi dukungannya untuk produksi industri baja nasional, jadi hal-hal lain yang mungkin data dan lainnya kami akan *support*.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian, dan juga kepada seluruh jajaran.

Untuk sebagai catatan bahwa hari ini Pak Dirjen sudah hadir di sini menunaikan tugas konstitusi dan juga menghargai kita sebagai mitra strategisnya Parlemen Republik Indonesia.

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* semoga rapat hari ini bisa membawa manfaat untuk kita dan juga Bangsa Indonesia serta seluruh rakyat Indonesia.

Dengan ini saya nyatakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian Republik Indonesia saya nyatakan ditutup.

*Wabillahi Taufik Walhidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.00 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

Dra. Nanik Herry Murti
NIP.196505061994032002